NEGARA HUKUM

Novinka Quddratul Ilmi
Email: nyukpin24@gmail.com
No BP: 2010003600040
Universitas Ekasakti

A. PENDAHULUAN

Negara hukum adalah negara berdasarkan atas hukum dan keadilan bagi warganya. Maksudnya adalah segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara atau dengan kata lain diatur oleh hukum. Hal yang demikian akan mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup warganya.

Pemikiran negara hukum di mulai sejak Plato dengan konsepnya “bahwa penyelenggaraan negara yang baik adalah yang didasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik yang disebut dengan istilah *nomoi*”. Kemudian ide tentang negara hukum populer pada abad ke-17 sebagai akibat dari situasi politik di Eropa yang didominasi oleh absolutisme. Dalam perkembangannya, paham negara hukum tidak dapat dipisahkan dari paham kerakyatan. Sebab pada akhirnya, hukum yang mengatur dan membatasi kekuasaan negara atau pemerintah diartikan sebagai hukum yang dibuat atas dasar kekuasaan dan kedaulatan rakyat. Dalam kaitannya dengan negara hukum, kedaulatan rakyat merupakan unsur material negara hukum, di samping masalah kesejahteraan rakyat.

Salah satu asas penting negara hukum adalah asas legalitas. Asas legalitas berkaitan erat dengan gagasan demokrasi dan gagasan negara hukum. Gagasan demokrasi menuntut agar setiap bentuk Undang-undang dan berbagai keputusan mendapatkan persetujuan dari wakil rakyat dan sebanyak mungkin memperhatikan kepentingan rakyat. Gagasan negara hukum menuntut agar penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintah harus didasarkan pada Undang-undang dan memberikan jaminan terhadap hak-hak dasar rakyat yang tertuang dalam Undang-undang. Menurut Sjachran Basah, asas legalitas berarti upaya mewujudkan *due integral* secara

harmonis antara paham kedaulatan hukum dan paham kedaulatan rakyat berdasarkan prinsip monodualitas selaku pilar-pilar, yang sifat hakikatnya konstitutif. Penerapan asas legalitas, menurut Indro Harto, akan menunjang berlakunya kepastian hukum dan berlakunya kesamaan perlakuan.

Lembaga negara adalah alat perlengkapan negara sebagaimana dimaksudkan oleh Undang-undang Dasar 1945, yaitu :

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
2. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
3. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
4. Presiden dan Wakil Presiden
5. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
6. Mahkamah Agung (MA)
7. Mahkamah Konstitusi (MK)
8. Komisi Yudisial (KY)

Jadi lembaga-lembaga tinggi negara itu menurut Undang-undang Dasar 1945 adalah untuk menampung kekuasaan agar bisa dilaksanakan, yang sebenarnya merupakan kekuasaan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau disebut juga dengan MPR; MPR sendiri menerima kekuasaan itu dari rakyat.⁵ Sejarah berdirinya Mahkamah Konstitusi atau disebut juga dengan MK diawali dengan diadopsinya ide Mahkamah Konstitusi (constitutional court) dalam amandemen konstitusi yang dilakukan oleh MPR pada tahun 2001 sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C, dan Pasal 7B Undang-undang Dasar 1945 hasil Perubahan Ketiga yang disahkan pada 9 November 2001. Ide pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu perkembangan pemikiran hukum dan kenegaraan modern yang muncul di abad ke-20. Setelah disahkannya perubahan ketiga Undang-undang Dasar 1945 maka dalam rangka menunggu pembentukan Mahkamah

konstitusi, MPR menetapkan Mahkamah Agung atau disebut juga dengan MA menjalankan fungsi mahkamah konstitusi untuk sementara sebagaimana diatur dalam pasal III aturan peralihan Undang-undang Dasar 1945 hasil perubahan keempat.

Dewan Perwakilan Rakyat atau disebut juga dengan DPR dan Pemerintah kemudian membuat rancangan Undang-undang mengenai Mahkamah Konstitusi. Setelah melalui pembahasan mendalam, DPR dan pemerintah menyetujui secara bersama Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang mahkamah konstitusi pada 13 Agustus 2003 dan disahkan oleh Presiden pada hari itu (lembaran negara Nomor 98 dan tambahan lembaran negara Nomor 4316). Dua hari kemudian, pada tanggal 15 Agustus 2003, Presiden melalui Keputusan Presiden Nomor 147/M Tahun 2003 hakim konstitusi untuk pertama kalinya yang dilanjutkan dengan pengucapan sumpah jabatan para hakim konstitusi di Istana negara pada tanggal 16 Agustus 2003. Lembaran perjalanan mahkamah konstitusi selanjutnya adalah pelimpahan perkara dari Mahkamah Agung (MA) ke Mahkamah Konstitusi (MK), pada tanggal 15 Oktober 2003 yang menandai mulai beroperasinya kegiatan mahkamah konstitusi sebagai salah satu cabang kekuasaan kehakiman menurut ketentuan Undang-Undang Dasar 1945.

Mahkamah konstitusi dibentuk menjamin agar konstitusi sebagai hukum tertinggi dapat ditegakkan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, mahkamah konstitusi biasa disebut sebagai *the guardian of the constitution* seperti sebutan yang biasa dinisbatkan kepada mahkamah agung di Amerika Serikat. Mengapa justru mahkamah agung yang disebut sebagai *the guardian of the constitution* di Amerika Serikat, sebabnya ialah karena disana tidak ada mahkamah konstitusi. Fungsi mahkamah konstitusi dalam arti yang lazim dikenal di dalam sistem Eropa yang menganut tradisi *civil law* seperti Austria, Jerman, dan Itali terintegrasi ke dalam kewenangan mahkamah agung Amerika Serikat, sehingga mahkamah agunglah yang disebut sebagai *the Guardian of American constitution*.

B. PEMBAHASAN

1. PENGERTIAN NEGARA HUKUM

Negara hukum adalah sebuah teori hukum yang berasal dari tradisi hukum Eropa yang dipengaruhi oleh Romawi. Teori ini menjadi dasar dari hukum yang berlaku pada negara-negara seperti Indonesia. Lawan dari teori ini adalah rule of law yang dikenal pada tradisi hukum Inggris.

Rechtsstaat merupakan suatu doktrin atau ajaran dari hukum Eropa Daratan yang berasal dari sistem hukum dari negara Jerman. Rechtsstaat merupakan negara yang mana menjadikan suatu hukum sebagai suatu dasar bagi penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan yang ada. Hukum yang dijalankan pada negara tersebut memiliki sifat yang adil dan baik. Di samping itu, hukum yang dijalankan juga dapat membatasi tindakan yang berasal dari pemegang kekuasaan di dalam negara tersebut.

Jadi, yang bisa dimaknai dari rechtsstaat merupakan suatu negara yang bersandar pada keyakinan bahwa kekuasaan dalam suatu negara harus senantiasa dijalankan berdasarkan hukum yang adil, baik dan bijaksana.

Hukum harus objektif tanpa memandang bulu.

2. UNSUR NEGARA HUKUM

a. Adanya hak dasar manusia yang dihargai. Penghargaan hak tersebut harus berkesesuaian dengan harkat maupun martabatnya sebagai seorang manusia. Jadi, ada sisi kemanusiaan yang harus dijunjung tinggi dari suatu negara yang berlandaskan hukum.

b. Terdapat pemisahan maupun pembagian kekuasaan guna menjamin terealisasinya hak-hak tersebut.

c. Pemerintahan dilakukan berdasarkan adanya peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku.

d. Terdapat peradilan administrasi di dalam suatu perselisihan yang terjadi antara rakyat maupun dengan pemerintahnya sendiri.

3. CIRI-CIRI NEGARA HUKUM

- a. Terdapat kekuasaan yang dijalankan berkesesuaian dengan hukum positif yang berlaku.
- b. Suatu pekerjaan negara berada di bawah kontrol kekuasaan kehakiman yang amat efektif.
- c. Adanya tuntutan atau senantiasa menuntut adanya pembagian kekuasaan.
- d. Rechstaat memiliki dasar yakni sebuah undang-undang dengan jaminan Hak Asasi Manusia (HAM).

Di samping itu, beberapa pakar atau ahli hukum juga menguraikan hal-hal apa saja yang menjadikan ciri-ciri dari rechstaat.

Salah satu dari pakar ilmu hukum tersebut adalah **Friedrich Julius Stahl**.

Ciri-ciri dari rechstaat menurut para pakar hukum yang dapat kamu ketahui di antaranya ialah sebagai berikut.

1. Adanya pemerintahan yang didasarkan pada berbagai ketentuan maupun peraturan.
2. Adanya peradilan administrasi di dalam suatu perselisihan yang terjadi.
3. Terdapat hak asasi orang guna menanggung hak asasi manusia secara umum atau trias politika.

Selain Friedrich Julius Stahl, ada juga pakar hukum lain

Yang turut serta dalam memberikan opininya terkait ciri-ciri rechstaat.

Dia adalah **AV Dicey**, Adapun ciri-ciri dari rechstaat menurutnya ialah sebagai berikut.

1. Adanya jaminan hak-hak orang di dalam undang-undang maupun peraturan pengadilan yang ada.
2. Adanya kedudukan yang sama di mata hukum, baik itu bagi kaum umum maupun bagi pejabat sekalipun.

3. Terdapat supremasi hukum, yang mana tidak dapat muncul kesewenang-wenangan hingga seorang tersebut hanya bisa dihukum apabila tidak mematuhi hukum yang berlaku.

4. KONSEP NEGARA HUKUM

- a. Konsep penempatan hukum sebagai kedaulatan tertinggi. Konsep pertama dari *rechstaat* ialah suatu konsep penempatan hukum yang dijadikan sebagai kedaulatan tertinggi dalam suatu penyelenggaraan negara.
- b. Konsep penempatan hukum sebagai suatu pembatas. Konsep kedua dari *rechstaat* ialah suatu konsep penempatan hukum yang berperan sebagai suatu pembatas atau batasan bagi kekuasaan yang dimiliki oleh penguasa. Konsep yang sudah dikenal sejak zaman Plato ini, pada mulanya dikenal dengan istilah *nomos* atau norma dan kemudian seiring berjalannya waktu berubah menjadi *nomokrasi* atau suatu pemerintahan oleh hukum.
- c. Konsep reaksi penempatan hukum sebagai kedaulatan tertinggi. Konsep ketiga dari *rechstaat* ialah suatu reaksi terhadap penempatan hukum yang dijadikan sebagai kedaulatan tertinggi pada tangan penyelenggara negara. Konsep kedaulatan negara yang dimaksud dikenal sebagai *machstaat*.

5. TEORI TERKAIT NEGARA HUKUM

Terdapat dua tipe intisari *rechstaat* :

1. Tipe *rechstaat* Eropa Kontinental .

Tipe Eropa Kontinental yang dimaksud ialah suatu tipe *rechstaat* yang didasarkan pada adanya kedaulatan hukum atau *rechtsouvereiniteit* yang memiliki inti *rechstaat* itu sendiri.

2. Tipe *rechstaat* Anglo Saxon.

Tipe ini didefinisikan sebagai tipe *rechstaat* yang mana pelaksanaan kekuasaan pemerintahannya dibatasi oleh hukum. Pakar ilmu hukum yang turut serta menyumbangkan

opininya tentang ciri-ciri *rechstaat* yakni Friedrich Stahl juga ikut serta dalam memberikan pendapat tentang teori-teori terkait *rechstaat*.

Adapun 4 teori dari **Friedrich Stahl** tersebut di antaranya ialah sebagai berikut.

1. Adanya jaminan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM).
2. Terdapat pembagian kekuasaan.
3. Pemerintahan didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang ada.
4. Terdapat peradilan administrasi negara yang berdiri sendiri atau mandiri.

AV Dicey juga ikut serta dalam memberikan opininya tentang teori *rechstaat*.

1. Equality before the law ,

Hal pertama yang dikemukakan AV Dicey tentang teori *rechstaat* ialah equality before the law.

Jadi, equality before the law merupakan suatu persamaan di mata hukum atau penundukkan yang sama dari seluruh golongan kepada ordinary law of the land. Dalam hal ini keseluruhan warga negara yang berlandaskan hukum mempunyai persamaan di mata hukum. Tidak peduli bagaimana latar belakang tiap-tiap warga negara tersebut.

2. Supremacy of law ,

Hal berikutnya yang diutarakan oleh AV Dicey ialah supremacy of law. Yang dimaksud dengan supremacy of law ialah adanya dominasi yang berasal dari aturan-aturan hukum guna melakukan pertentangan serta untuk meniadakan kesewenang-wenangan.

3. Due process of law,

Hal terakhir yang diungkapkan oleh AV Dicey ialah due process of law. Tahukah kamu bahwa yang dimaksud dengan due process of law ialah terjaminnya hak-hak manusia oleh konstitusi yang mana merupakan suatu hasil dari the ordinary law of land. Jadi, hukum konstitusi bukanlah merupakan sumber, melainkan suatu konsekuensi yang berasal dari hak-hak individu dari peradilan.

Jadi, prinsip-prinsip hukum privat diadakan melalui tindakan peradilan maupun perlemen dengan sedemikian rupa untuk membatasi posisi crown.

Brian Tamanaha turut serta dalam memberikan opininya terkait teori negara yang menerapkan sistem hukum.

Adapun teori negara berlandaskan hukum menurut Brian Tamanaha ialah terkait konsep formal dan substantif.

6. PRINSIP NEGARA HUKUM

1. Supremasi hukum (supremacy of law) ,

Prinsip pertama dari negara yang memiliki landasan hukum ialah supremasi hukum atau supremacy of law. prinsip supremasi hukum menekankan kepada pemimpin tertinggi dalam suatu negara bukanlah manusia itu sendiri, melainkan konstitusinya. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan the rule of law and not of man.

2. Persamaan dalam hukum (equality before the law) ,

Prinsip berikutnya dari negara yang berlandaskan hukum ialah adanya persamaan dalam hukum. Dalam prinsip ini, tiap-tiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di mata hukum dan pemerintahan. Tidak ada yang namanya saling membedakan. Tidak peduli perbedaan latar belakang. Semua sama di mata hukum. Sikap diskriminatif pun dilarang dalam negara yang memiliki landasan hukum. Dengan adanya prinsip ini, diharapkan dapat tercapai perkembangan yang jauh lebih maju dan setara dengan kelompok masyarakat lainnya yang telah maju.

3. Asas legalitas (due process of law) ,

Adapun yang dimaksud dengan asas legalitas ialah segala tindakan pemerintahan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang telah disahkan oleh petinggi terkait dalam bentuk tertulis. Dalam hal tersebut, segala tindakan dan perbuatan harus didasarkan pada segala aturan yang berlaku.

4. Pembatasan kekuasaan,

Kekuasaan harus senantiasa dibatasi dengan cara memisahkan kekuasaan pada cabang-cabang yang bersifat check and balance dalam suatu kedudukan yang sederajat. Hal tersebut dapat dilakukan melalui pembagian kekuasaan secara horizontal. Lain halnya dengan

pembagian kekuasaan secara horizontal, maka pembagian kekuasaan secara vertikal senantiasa mampu membagi kekuasaan dengan baik sehingga negara tidak tersentralisasi maupun terkonsentrasi pada suatu hal, yang mana bisa menimbulkan sikap kesewenang-wenangan.

5.Organ-organ eksekutif independent,

Jadi, yang dimaksud dengan organ-organ eksekutif independen mengacu kepada independensi lembaga eksekutif. Independensi lembaga tersebut dianggap penting guna memberikan jaminan atas demokrasi, karena dianggap fungsinya bisa disalahgunakan oleh pemerintah yang ada guna melanggengkan kekuasaanya.

6.Peradilan bebas dan tidak memihak (independent and impartial judiciary),

Dalam upaya menjalankan tugas yudisialnya, maka hakim sejatinya tidak diizinkan untuk mendapatkan pengaruh dari siapapun, bahkan tanpa terkecuali orang-orang terdekatnya. Hakim harus senantiasa bijak dan jujur dalam memutus suatu perkara. Di samping itu, hakim harus senantiasa terbuka dalam upaya melakukan pemeriksaan terkait suatu perkara serta menghayati nilai-nilai keadilan dalam menentukan keputusan.

7.Peradilan tata usaha negara,

Negara yang berlandaskan hukum harus senantiasa membuka kesempatan bagi tiap-tiap warganya untuk dapat menggugat suatu keputusan pejabat administrasi negara serta dijalankannya putusan hakim tata usaha negara oleh pejabat tersebut.

Peradilan tata negara (constitutional court), Pentingnya suatu peradilan tata negara difungsikan sebagai suatu upaya guna memperkuat sistem cek maupun sitem keseimbangan di antara cabang-cabang kekuasaan yang mana disengaja untuk dipisahkan guna melakukan jaminan demokrasi.

8.Perlindungan hak asasi manusia ,

Suatu perlindungan terhadap hak asasi manusia atau HAM senantiasa dimasyarakatkan secara luas dalam rangka mempromosikan bentuk penghormatan maupun segala perlindungan terkait hak-hak asasi manusia itu sendiri.

Bersifat demokratis (democratische rechtsstaat) , Jadi, suatu negara yang memiliki landasan hukum sudah sepatutnya harus mengembangkan negara yang demokratis.

Sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara (welfare rechtstaat) , Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memuat tujuan bernegara Indonesia dalam rangka untuk

melindungi segenap bangsa Indonesia hingga ingin mencapai keadilan sosial. Dengan adanya tujuan bernegara yang dimuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut diharapkan suatu negara dapat melakukan pembangunan yang rasional dan senantiasa menyesuaikan tujuan

7. NEGARA HUKUM INDONESIA

a. Landasan yuridis negara hukum Indonesia

Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 memuat landasan yuridis negara Indonesia ini. Tepatnya adalah pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berisikan tentang sistem pemerintahan negara Indonesia. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, negara Indonesia sejatinya merupakan negara yang berdasarkan atau memiliki suatu landasan hukum serta tidak berdasarkan pada suatu kekuasaan semata saja. Di samping itu, berdasarkan Undang-Undang 1945 sistem konstitusional pemerintah berdasarkan atas suatu sistem konstitusi yang tidak memiliki sifat absolut (berkekuasaan tak terbatas). Jadi, dapat disimpulkan bahwa sejatinya negara Indonesia ini merupakan negara yang didasarkan pada hukum dan bukan berdasarkan pada kekuasaan belaka. Selain itu, pemerintah negara berdasarkan pada suatu konstitusi dengan kekuasaan yang dimiliki pemerintah merupakan kekuasaan yang terbatas atau tidak absolut. Secara singkat konsepsi dari negara Indonesia yang berlandaskan hukum merupakan suatu konsep negara dengan hukum materiil atau memiliki cakupan yang cukup luas guna kepentingan pembangunan kesejahteraan umum.

b. Perwujudan negara hukum Indonesia

Pada suatu negara yang berlandaskan hukum, tiap-tiap aspek perlakuan maupun tindakan pemerintahan baik dalam lapangan pengaturan maupun pada lapangan pelayanan yang senantiasa harus didasarkan pada segala peraturan perundang-undangan. Jadi, pemerintah yang bersangkutan tidak diperkenankan untuk melakukan tindakan yang sewenang-wenang.

Unsur-unsur yang berlaku bagi tiap-tiap warga negara yang berlandaskan hukum dalam upaya mewujudkan negara yang sejahtera:

- Unsur pertama dari perwujudan negara berlandaskan hukum yang berlaku bagi tiap-tiap warga negaranya ialah adanya suatu sistem pemerintahan negara yang didasarkan pada kedaulatan rakyat.

- Unsur kedua dari perwujudan negara berlandaskan hukum yang berlaku bagi tiap-tiapwarga negaranya adalah adanya jaminan atas hak-hak asasi manusia.
- Unsur berikutnya yang dapat kamu ketahui guna mewujudkan rechstaat yang sesungguhnya ialah adanya pembagian kekuasaan dalam negara tersebut.
- Unsur selanjutnya yang bisa kamu ketahui guna mewujudkan rechstaat yang sebenarnya ialah dengan menerapkan peran nyata bagi anggota-anggota masyarakat untuk ikut serta dalam mengawasi suatu perbuatan maupun tindakan yang dilakukan oleh pemerintah yang berkuasa.
- Unsur lainnya yang diberlakukan guna mewujudkan rechstaat yang sejahtera ialah adanya suatu pengawasan yang berasal dari badan-badan peradilan yang bebas dan mandiri. Jadi, makna sesungguhnya dari badan peradilan ialah suatu badan atau lembaga yang tidak memihak serta tidak berada dalam naungan badan eksekutif lainnya.
- Unsur berikutnya yang harus dipenuhi guna mewujudkan tujuan yang sebenarnya ialah adanya pernyataan bahwa dalam hal melaksanakan tugas dan kewajibannya, pemerintah harus senantiasa didasarkan pada hukum perundang-undangan.
- Unsur terakhir yang harus dipenuhi guna meralisasikan tujuan negara yang memiliki landasan hukum ialah adanya suatu sistem perekonomian yang memberikan jaminan terhadap pembagian yang cenderung merata guna kemakmuran warga negaranya.

8. MACAM- MACAM BIDANG HUKUM DI INDONESIA

a. Bidang hukum pidana

Bidang hukum pidana sejatinya termasuk ke dalam ranah bidang hukum publik yang mana mengatur hubungan antara subjek dan perbuatan yang dilakukan. Hukum pidana mengatur bagaimana hubungan subjek dan perbuatan yang harus dilaksanakan maupun yang harus dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berakibat pada diterapkannya sanksi berupa pemidanaan maupun denda bagi tiap-tipa pelanggarnya. Pada bidang hukum pidana terdapat dua jenis perbuatan yang bisa diberikan ganjaran bagi tiap pelanggarnya. Adapun dua jenis perbuatan tersebut mencakup kejahatan dan pelanggaran.

Jadi, kejahatan merupakan suatu perbuatan maupun tindakan yang tidak hanya bertentangan dengan peraturan perundang-undang saja melainkan juga bertentang dengan kaidah-kaidah lainnya. Adapun contoh dari kejahatan di antaranya membunuh, melakukan

penganiayaan, pemerkosaan dan sebagainya. Pelanggaran adalah suatu tindakan atau perbuatan yang mana hanya dilarang karena tidak memberikan pengaruh yang langsung bagi pelakunya. Adapun contoh dari pelanggaran di antara anak SMA yang tidak menggunakan helm ketika menaiki motor ke sekolah Contoh lain, orang yang bepergian menggunakan mobil pribadi tanpa mengenakan sabuk pengaman serta membuang sampah tidak pada tempat yang benar. Jika dilihat dari sudut pandang Islam, maka hukum pidana sejatinya diatur dengan qisas. Qisas adalah sesuatu yang impas, jadi nyawa harus dibalas dengan nyawa.

b. Bidang hukum perdata

Jadi, bidang hukum perdata atau yang sering disebut ke dalam ranah bidang hukum privat atau hukum sipil merupakan bidang hukum yang digunakan untuk mengatur hubungan-hubungan antar individu dalam suatu kelompok masyarakat pada saluran tertentu.

Hukum perdata dalam digolongkan menjadi beberapa jenis, yang mana di antaranya ialah sebagai berikut.

- Hukum keluarga, merupakan suatu hukum yang berisikan ketentuan untuk mengatur perkawinan serta segala akibat yang ditimbulkan (yang erat kaitannya dengan hukum).
- Hukum benda, merupakan suatu hukum atau keseluruhan peraturan yang mengatur tentang hubungan hukum antara seseorang dengan suatu benda. Jadi, hukum benda terjadi antara manusia dengan benda itu sendiri.
- Hukum perikatan, merupakan suatu hukum yang memuat aturan terkait lapangan harta kekayaan di antara kedua orang maupun lebih yang salah satu pihak berperan sebagai yang berhak akan sesuatu sedangkan pihak lainnya berperan sebagai yang berkewajiban atas sesuatu.
- Hukum harta kekayaan, merupakan suatu hukum yang mana memuat aturan tentang segala peraturan atau ketentuan yang digunakan untuk mengelola hak maupun mengelola kewajiban manusia yang mana memiliki nilai finansial.
- Hukum waris, merupakan suatu hukum yang memuat aturan atau ketentuan terkait peninggalan harta seseorang yang mana dalam kondisi telah meninggal dunia dan harta kekayaan yang dimiliki seseorang tersebut akan diberikan kepada ahli waris atau orang yang namanya telah tercantum pada surat wasiat tertentu.

c. Bidang hukum acara

Bidang hukum acara ialah suatu ketentuan yang digunakan untuk mengatur bagaimana cara dan siapa yang memiliki wewenang guna menegakkan hukum materiil dalam suatu hal yang terjadi pelanggaran terhadap hukum materiil. Jadi, apabila tidak ada hukum acara yang jelas maka pihak yang berwenang akan merasa kesulitan untuk menegakkan hukum materiil. Guna menegakkan suatu hukum materiil pidana, maka dibutuhkan hukum acara pidana begitu pula dengan hukum materiil perdata yang memerlukan hukum acara perdata.

C. PENUTUP

A. Kesimpulan

Negara Hukum adalah negara yang berdasarkan hukum, tidak berdasarkan kekuasaan dan pemerintahnya tidak berdasarkan sistem konstitusi (hukum dasar) bukan absolute (kekuasaan yang tidak terbatas).

Ciri-ciri suatu negara hukum adalah sebagai berikut

- a. Pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi, dan kebudayaan.
- b. Peradilan yang bebas dari suatu pengaruh kekuasaan atau kekuatan lain dan tidak memihak.
- c. Jaminan kepastian hukum, yaitu jaminan bahwa ketentuan hukumnya dapat dipahami, dapat dilaksanakan, dan aman dalam melaksanakannya.

Tipe negara hukum diantaranya: Negara Hukum Liberal, Negara Hukum Formil, Negara Hukum Materiil. Indonesia sebagai Negara Hukum tertera pada Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa "Negara Indonesia adalah Negara Hukum". HAM adalah hak yang sudah melekat dalam diri manusia yang keberadaannya harus dihormati, dijunjung tinggi, dijaga, dan dilindungi oleh setiap individu. Hak itu meliputi hak personal, hukum, ekonomi, politik, sosial dan budaya maupun hak peradilan. Di Indonesia HAM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999.

Antara Negara Hukum dan HAM tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Argumentasi hukum yang dapat diajukan tentang hal ini, ditunjukkan dengan ciri negara hukum itu sendiri, bahwa salah satu diantaranya adalah perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia.

B. Saran

Kita sebaiknya mencari informasi lebih tentang Negara Hukum dan HAM agar lebih memahami kedua bahan pembahasan di atas. Kita sebagai mahasiswa dan generasi penerus bangsa, sudah semestinya membantu pemerintah untuk terus menegakkan HAM di Indonesia. Rakyat juga harus membantu mewujudkannya dengan mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang ada dalam negara Indonesia, serta membantu pemerintah dalam mewujudkan negara aman dan makmur.

DAFTAR PUSTAKA

- Darmini Roza dan Laurensius Arliman S Peran Pemerintah Daerah Di Dalam Melindungi Hak Anak Di Indonesia, *Masalah-Masalah Hukum*, Volume 47, Nomor 1, 2018.
- Laurensius Arliman S, *Komnas HAM dan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, 2015.
- Laurensius Arliman S, *Penguatan Perlindungan Anak Dari Tindakan Human Trafficking Di Daerah Perbatasan Indonesia*, *Jurnal Selat*, Volume 4, Nomor 1, 2016.
- Laurensius Arliman S, *Problematika Dan Solusi Pemenuhan Perlindungan Hak Anak Sebagai Tersangka Tindak Pidana Di Satlantas Polresta Pariaman*, *Justicia Islamica*, Volume 13, Nomor 2, 2016.
- Laurensius Arliman S, *Pelaksanaan Perlindungan Anak Yang Tereksplotasi Secara Ekonomi Oleh Pemerintah Kota Padang*, *Veritas et Justitia*, Volume 2, Nomor 1, 2016.
- Laurensius Arliman S, *Kedudukan Ketetapan MPR Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*, *Lex Jurnalica*, Volume 13, Nomor 3, 2016.
- Laurensius Arliman S, *Komnas Perempuan Sebagai State Auxiliary Bodies Dalam Penegakan HAM Perempuan Indonesia*, *Justicia Islamica*, Volume 14, Nomor 2, 2017.
- Laurensius Arliman S, *Peranan Pers Untuk Mewujudkan Perlindungan Anak Berkelanjutan Di Indonesia*, *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, Volume 2, Nomor 2, 2017.
- Laurensius Arliman S, *Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Untuk Mewujudkan Indonesia Sebagai Negara Hukum*, *Jurnal Hukum Doctrinal*, Volume 2, Nomor 2, 2017.
- Laurensius Arliman S, *Participation Non-Governmental Organization In Protecting Child Rights In The Area Of Social Conflict*, *The 1st Ushuluddin and Islamic Thought International Conference (Usicon)*, Volume 1, 2017.
- Laurensius Arliman S, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Negara Kesejahteraan Indonesia*, *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja*, Volume 10, Nomor 1, 2017, <https://doi.org/10.33701/jppdp.v10i1.379>.
- Laurensius Arliman S, *Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Untuk Mewujudkan Perlindungan Anak*, *Jurnal Respublica* Volume 17, Nomor 2, 2018.
- Laurensius Arliman S, *Menjerat Pelaku Penyuruh Pengrusakan Barang Milik Orang Lain Dengan Mempertimbangkan Asas Fungsi Sosial*, *Jurnal Gagasan Hukum*, Volume 1, Nomor 1, 2019.

- Laurensius Arliman S, *Ilmu Perundang-Undangan Yang Baik Untuk Negara Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta, 2019.
- Laurensius Arliman S, Isdal Veri, Gustiwarni, Elfitrayenti, Ade Sakurawati, Yasri, *Pengaruh Karakteristik Individu, Perlindungan Hak Perempuan Terhadap Kualitas Pelayanan Komnas Perempuan Dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia Sebagai Variabel Mediasi*, Jurnal Menara Ekonomi: Penelitian dan Kajian Ilmiah Bidang Ekonomi, Volume 6, Nomor 2, 2020.
- Laurensius Arliman S, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Deepublish, Yogyakarta, 2020.
- Laurensius Arliman S, *Makna Keuangan Negara Dalam Pasal Pasal 23 E Undang-Undang Dasar 1945*, Jurnal Lex Librum, Volume 6, Nomor 2 Juni 2020, <http://dx.doi.org/10.46839/lljih.v6i2.151>.
- Laurensius Arliman S, *Kedudukan Lembaga Negara Independen Di Indonesia Untuk Mencapai Tujuan Negara Hukum*, Kertha Semaya Journal Ilmu Hukum, Volume 8, Nomor 7, 2020.
- Laurensius Arliman S, *Pelaksanaan Assesment Oleh Polres Kepulauan Mentawai Sebagai Bentuk Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika*, Jurnal Muhakkamah, Volume 5, Nomor 1, 2020.
- Laurensius Arliman S, Aswandi Aswandi, Firgi Nurdiansyah, Laxmy Defilah, Nova Sari Yudistia, Ni Putu Eka, Viona Putri, Zakia Zakia, Ernita Arief, *Prinsip, Mekanisme Dan Bentuk Pelayanan Informasi Kepada Publik Oleh Direktorat Jenderal Pajak*, Volume 17, No Nomor, 2020.
- Laurensius Arliman S, *Koordinasi PT. Pegadaian (Persero) Dengan Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumbar Dalam Penimbangan Barang Bukti Penyalahgunaan Narkotika*, UIR Law Review, Volume 4, Nomor 2, 2020, [https://doi.org/10.25299/uirrev.2020.vol4\(1\).3779](https://doi.org/10.25299/uirrev.2020.vol4(1).3779).
- Laurensius Arliman S, *Tantangan Pendidikan Kewarganegaraan Pada Revolusi 4.0*, Ensiklopedia Sosial Review, Volume 2, Nomor 3, 2020.
- Muhammad Afif dan Laurensius Arliman S, *Protection Of Children's Rights Of The Islamic And Constitutional Law Perspective Of The Republic Of Indonesia*, Proceeding: Internasional Conference On Humanity, Law And Sharia (Ichlash), Volume 1, Nomor 2, 2020.
- Otong Rosadi dan Laurensius Arliman S, *Urgensi Pengaturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Berdasarkan Undang-Undang Sebagai State Auxiliary Bodies yang Merawat Pancasila dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Prosiding Konferensi Nasional Hak Asasi Manusia, Kebudayaan dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia pada Masa Pandemi Covid-19: Tantangan untuk Keilmuan Hukum dan Sosial Volume 1, Universitas Pancasila, Jakarta, 2020.